

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul/Jurnal	Meotde	Hasil
1.	(Setyawan Budi 2019)	PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS TERHADAP PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKANDI BURSA EFEK INDONESIA)	Kuantitatif	Proksi GCG sebagian besar tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan emiten perbankan, kecuali jumlah direksi. Ini menunjukkan bahwa variabel GCG belum optimal dalam meningkatkan kinerja keuangan. Ukuran perusahaan juga tidak berpengaruh signifikan, menunjukkan bahwa bank dengan aset besar belum tentu memiliki kinerja keuangan yang baik, dan investor lebih mempertimbangkan faktor teknikal daripada fundamental. Namun, profitabilitas memiliki pengaruh signifikan; semakin tinggi <i>Return on Assets</i> (ROA), semakin

				besar keuntungan yang dicapai, menunjukkan bahwa kemampuan menciptakan laba adalah faktor utama dalam kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan.
2	(Eko et al. 2017)	Pengaruh Praktek Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan Perbankan di Indonesia	Kuantitatif	Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan. Penerapan GCG belum berdampak jelas pada nilai perusahaan, sehingga perusahaan disarankan untuk tidak hanya mengandalkan GCG dalam meningkatkan nilai perusahaan. Investor perlu mempertimbangkan faktor lain seperti kinerja perusahaan dan fluktuasi harga saham. Penelitian ini terbatas karena data GCG belum menggambarkan penerapan sebenarnya. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan

				prinsip-prinsip GCG dan tingkat kesehatan bank sebagai indikator.
3	(Marini and Marina 2017)	PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN	Kuantitatif	<p>Hasil pengujian menunjukkan bahwa dewan komisaris, komisaris independen, dan dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dewan komisaris memastikan manajemen bekerja demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham, yang meningkatkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan nilai perusahaan. Komisaris independen berperan sebagai penengah dan pengawas objektif, mendukung kinerja dan operasi perusahaan yang bersih, sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Dewan direksi mengawasi pengelolaan perusahaan</p>

				<p>dan melaporkan kepada dewan komisaris, dengan komposisi yang efektif untuk pengambilan keputusan cepat dan independen, yang juga meningkatkan nilai perusahaan. Namun, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, mungkin karena rendahnya frekuensi pertemuan atau keberadaan anggota komite audit tidak menjamin peningkatan kinerja perusahaan, sehingga pasar tidak menganggapnya sebagai faktor penting dalam menilai perusahaan.</p>
--	--	--	--	---

4.	(Anjani and Hariyanto)	Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pada Bank UMKM Jawa Timur	Kuantitatif	Penelitian ini menemukan bukti empiris yang menunjukkan adanya pengaruh penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap keandalan laporan keuangan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.
----	------------------------	--	-------------	---

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Di era ekonomi modern, pengelolaan perusahaan seringkali dipisahkan dari kepemilikannya, hal ini sejalan dengan teori agensi yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan kepada tenaga profesional, atau agen, yang lebih memahami operasional bisnis sehari-hari. Teori Agensi membantu menganalisis dampak hubungan antara agen dan pemilik (*Principal*) atau antar pemilik. Pemisahan ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan pemilik perusahaan dengan biaya yang efisien melalui pengelolaan oleh tenaga profesional.

Menurut Teori Agensi membahas hubungan antara dua pihak, yaitu pemberi mandat (prinsipal) dan pelaksana mandat (agen). Pemberi mandat mendelegasikan tugas pengambilan keputusan kepada pelaksana mandat. Masing-masing pihak dianggap sebagai individu rasional yang bertindak berdasarkan kepentingan pribadi. Namun, mereka seringkali tidak memiliki pemahaman yang

sama mengenai tujuan, kepercayaan, dan informasi yang mendasari keputusan. Hak dan kewajiban antara kedua pihak diatur dalam perjanjian kerja yang saling menguntungkan.

Corporate Governance didasari oleh teori ini, yang menjelaskan bahwa permasalahan muncul ketika pengelolaan perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Dewan komisaris dan direksi, yang berperan sebagai agen dalam perusahaan, memiliki kewenangan untuk menjalankan perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Namun, dengan kewenangan tersebut, terdapat potensi bagi manajer untuk tidak bertindak demi kepentingan terbaik pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*Conflict of Interest*), hal ini berarti kepentingan manajer berbeda dengan kepentingan pemilik.

Dalam penelitiannya (Hamdani Mailani 2016) Teori Agensi memicu munculnya konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan bisnis perusahaan. GCG bertujuan untuk meminimalkan permasalahan keagenan melalui pengawasan terhadap kinerja para agan. Penerapan GCG memberikan jaminan kepada para pemegang saham bahwa dana yang mereka investasikan dikelola dengan baik dan para agen menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan demi kepentingan perusahaan.

Teori agensi mendorong munculnya konsep GCG dalam pengelolaan bisnis perusahaan, dimana GCG diharapkan dapat meminimalkan konglik melalui pengawasan terhadap kinerja agen. Dengan demikian, GCG menjamin bahwa dana investasi dikelola dengan baik dan agen bekerja sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan perusahaan. Ide dasar teori agensi memberikan perspektif baru dalam corporate governance, yang menunjukkan perusahaan sebagai suatu hubungan kerja sama antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajemen). Karena manajemen memiliki kepentingan sendiri, diperlukan proses check and balance untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen. Dengan demikian, GCG dapat diaplikasikan untuk mencapai tujuan tersebut. (Muhammad Rafly Ramadhan, Lilian Wijaya, dan Ruslan 2022).

2.3 GCG (*Good Corporate Governance*)

Menurut (Otoritas Jasa Keuangan Indonesia t.t.) pada POJK No. 35/POJK.04/2014, *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sekumpulan prinsip dan praktik yang memastikan perusahaan dikelola dengan transparansi, tanggung jawab dan keadilan. GCG dianggap penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Dan menurut *International Finance Corporation* (IFC) pada (*THE INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE MANUAL First Edition 2014*) sebagai praktik pengelolaan perusahaan yang memastikan kepentingan semua pemangku kepentingan terlindungi dan menjamin keberlanjutan bisnis secara berkelanjutan.

Berdasarkan definisi ini beberapa prinsip yang diperlukan untuk mengimplementasi GCG antara lain:

a) Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah prinsip penting dalam tata kelola perusahaan yang baik. Transparansi dapat membantu membangun kepercayaan, meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian, asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham atau pemilik perusahaan dapat di kurangi.

b) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah prinsip penting dalam tata kelola yang baik. Akuntabilitas dapat membantu membangun kepercayaan, meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pihak yang menjalankan kegiatan publik. GCG menetapkan mekanisme untuk memastikan bahwa manajemen bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pengawasan yang efektif oleh dewan direksi dan komite audit membantu memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

c) Responsibilitas (*Responsibility*)

Kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan melibatkan penerapan prinsip-prinsip korporasi yang sehat serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus menaati hukum dan menjalankan tanggung

jawab terhadap masyarakat dan lingkungan untuk menjaga kesinambungan usaha dalam jangka Panjang dan diakui sebagai perusahaan dengan tata kelola yang baik (*good corporate citizen*).

d) Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian adalah suatu kondisi dimana pengelola perusahaan membuat keputusan secara professional dan independent, tanpa adanya konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kemandirian, pengelola perusahaan juga tidak terpengaruh oleh tekanan atau pengaruh yang bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip yang mengharuskan pengelola perusahaan untuk memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan merata. Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan sehingga semua pihak dapat memperoleh manfaat yang adil dan merata.

Indikator GCG (Good Corporate Governance) pada laporan keuangan mencakup beberapa aspek penting yang mencerminkan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Pertama, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, menunjukkan transparansi dan kejujuran dalam penyajian informasi keuangan. Kemudian, penyajian yang jelas dan mudah dipahami juga menjadi indikator GCG, agar informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik oleh para pemangku kepentingan. Selanjutnya, konsistensi dalam menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu adalah hal penting untuk memperlihatkan kedisiplinan dan keterbukaan perusahaan terhadap publik. Proses audit yang dilakukan oleh pihak eksternal yang independen juga menjadi indikator GCG yang menunjukkan adanya pengawasan yang memadai terhadap laporan keuangan. Keseluruhan, indikator GCG pada laporan keuangan menggarisbawahi komitmen perusahaan untuk menjalankan praktik tata kelola yang baik, memastikan

integritas dan keandalan informasi keuangan yang disampaikan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Beberapa indikator kunci yang sering di gunakan untuk menilai GCG meliputi Kepemilikan Institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris indepenen, dewan direksi, dan komite audit, masing-masing indicator ini memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam memastikan bahwa perusahaan dikelola secara etis dan efisien (Eko 2017).

a) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan jumlah saham oleh perusahaan atau institusi lain. Investor innstitusional biasanya lebih mampu menggunakan informasi perusahaan dalam memprediksi laba masa depan daripada incvestor non institusional. Investor institusional mempunyai akses atas sumber informasi yang lebih tepat waktu dan teleban yang dapat mengetahui keberadaan pengelolaan laba lebih ceat dibandingkan investor individual. Investor institusional dianggap memiliki kemauan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif yang dapat menaikkan kinerja perusahaan sehingga akan menarik banyak investor untuk menanamkan saham ke dalam perusahaan dengan demikian nilai perusahaan juga akan meningkat (Ruslim & Santoso, 2018).

b) Kepemilikan Manajerial

Penelitian menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Mereka menemukan bahwa kepentingan manajer dengan pemegang saham eksternal dapat disatukan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar sehingga manajer tidak akan memanipulasi laba untuk kepentingannya (Ruslim & Santoso, 2018).

c) Komisaris Independen

Komisaris independen adalah dewan komisaris yang memiliki peranan sebagai pengawas yang independen di dalam perusahaan agar tidak terjadi kecurangan. Dengan adanya komisaris independen, dimaksudkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, sehingga masalah keagenan akan berkurang. Ketika masalah keagenan berkurang, manajemen laba juga akan berkurang, hal ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan investor dan berdampak pada naiknya harga saham perusahaan dan pada akhirnya nilai perusahaan juga akan meningkat (Ruslim & Santoso, 2018).

d) Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu syarat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Komite ini dibentuk sebagai komite khusus untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan. Tugas komite audit mencakup pengawasan terhadap laporan keuangan, audit eksternal, dan sistem pengendalian internal. Ketika komite audit menjalankan tugasnya dengan baik, pengawasan menjadi lebih efektif sehingga kinerja perusahaan meningkat. Hal ini dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan saham dalam perusahaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan (Ruslim & Santoso, 2018).

GCG yang baik tidak hanya berfokus pada menjaga integritas dan kepatuhan perusahaan, tetapi juga dapat berperan penting dalam meningkatkan nilai jangka Panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam mengimplementasikan GCG, perusahaan diharapkan untuk mempertimbangkan konteksnya sendiri dan menerapkan praktik terbaik untuk mendukung kinerja keuangan yang berkelanjutan.

2.4 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana perusahaan dapat menerapkan aturan-aturan keuangan yang sesuai. Pengukuran ini dilakukan secara teratur dengan tujuan menilai peningkatan yang sudah dicapai perusahaan, Kinerja keuangan juga menyediakan informasi relevan untuk pengambilan keputusan manajemn, dan meningkatkan nilai perusahaan bagi para pemangku kepentingan. (Dewi, Rizki & Saad).

Kinerja keuangan pada beberapa perusahaan bisa dilihat dari *Return on Assets* (ROA), yang dimana dapat mewakili pengukuran aspek laba perusahaan atau rentabilitas. ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, semakin efisien pula penggunaan aktiva, yang berdampak pada meningkatnya laba bersih perusahaan tersebut. Sebaliknya, rasio ROA yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu mengelola asetnya untuk menghasilkan laba, sehingga tidak menarik bagi investor karena tingkat pengembalian investasi yang rendah.

Melalui berbagai mekanisme, struktur GCG perusahaan dapat berdampak langsung ROA, GCG membantu mengoptimalkan penggunaan aset perusahaan dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan. Keuda, struktur GCG yang kuat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan berdasarkan data, yang mendorong alokasi sumber daya yang lebih tepat dan strategis. Terakhir, implementasi GCG yang efektif cenderung mengurangi biaya operasional dan risiko keuangan yang meningkatkan profitabilitas.

2.5 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

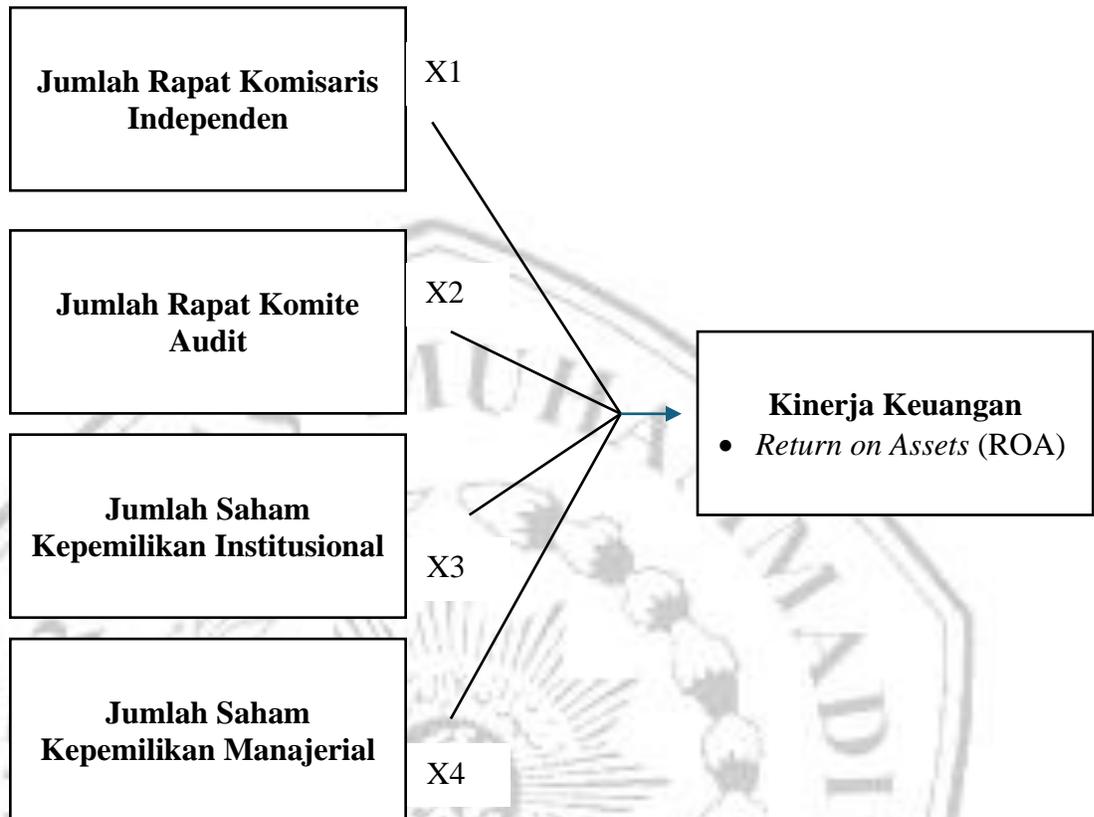
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang di tetapkan. Kriteria UMKM dalam pasal 6 undang-undang tersebut adalah: Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000, tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan penjualan tahunan maksimal Rp. 300.000.000. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 hingga Rp. 500.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan penjualan tahunan di atas Rp. 300.000.000 hingga maksimal Rp. 2.500.000.000. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), definisi UMKM juga didasarkan pada jumlah tenaga kerja, dimana usaha kecil memiliki 5 hingga 19 tenaga kerja.

UMKM memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, serta di negara lain. UMKM sering dianggap sebagai tulang punggung ekonomi karena kontribusinya yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah akses yang terbatas terhadap sumber pembiayaan yang memadai untuk mendukung pertumbuhan dan ekspansi usaha mereka.

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional. Dengan GCG, UMKM dapat membangun kepercayaan dengan investor dan lembaga keuangan, mempermudah akses ke sumber daya finansial. Selain itu, GCG membantu UMKM mengidentifikasi dan mengelola risiko, memastikan kepatuhan hukum, serta meningkatkan daya saing melalui reputasi yang baik dan inovasi berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah dan lembaga internasional juga lebih mudah didapatkan oleh UMKM yang menerapkan GCG, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka.

2.6 Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan pada gambar 2.1, penelitian ini terfokus pada pengkajian dari dampak GCG dengan indikator pengukuran Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit dan akan dikaji pengaruhnya terhadap kinerja keuangan UMKM yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia dengan diukur oleh *Return on Equity* dan *Return on Assets*.

2.7 Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Komiasarin Independen Terhadap Kinerja Keuangan

Komisaris independen memegang peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Semakin banyak komisaris independen yang ada, semakin besar kemungkinan keputusan dewan

komisaris akan lebih berfokus pada kepentingan perusahaan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan (Situmorang dan Simanjuntak 2019).

Teori keagenan (Agency Theory) menjelaskan hubungan antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen), di mana sering kali terjadi potensi konflik kepentingan. Pemilik menginginkan peningkatan nilai perusahaan, sementara manajer mungkin membuat keputusan yang lebih menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Dalam konteks ini, komisaris independen berperan sebagai mekanisme penting untuk mengurangi konflik tersebut. Sebagai anggota dewan komisaris yang tidak terlibat dalam operasional sehari-hari dan tidak memiliki kepentingan pribadi dengan perusahaan, komisaris independen dapat memberikan pengawasan yang lebih objektif. Hal ini membantu memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.

H1: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

2. Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Tanggung jawab Komite Audit meliputi pengawasan terhadap perusahaan dalam hal pemahaman tentang berbagai potensi risiko, penguatan sistem pengendalian internal, dan pemantauan terhadap proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal atau Satuan Pengawasan Internal (Febrina dan Sri 2022).

Komite Audit memegang peran penting dan strategis dalam menjaga kredibilitas laporan keuangan serta memastikan adanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai dan penerapan Good Corporate Governance. Dengan efektivitas fungsi Komite Audit, pengawasan perusahaan akan lebih baik, sehingga dapat mengurangi konflik keagenan yang timbul dari keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi mereka (Febrina & Sri, 2022).

H2: Komisaris Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan

Teori keagenan dalam kepemilikan manajerial merupakan salah satu metode untuk mengatasi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Dengan memberikan kepemilikan saham kepada manajer, kepentingan manajer dan pemegang saham dapat diselaraskan, sehingga manajer memperoleh keuntungan langsung dari keputusan yang mereka buat. Pendekatan ini meningkatkan motivasi manajer untuk bekerja lebih giat demi meningkatkan kinerja perusahaan.

Kepemilikan saham oleh manajer dapat menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dan manajer, yang membantu mengurangi konflik keagenan. Hal ini berarti bahwa ketika manajer memiliki saham perusahaan, mereka akan secara langsung merasakan dampak dari keputusan yang mereka buat. Oleh karena itu, kepemilikan saham yang cukup besar oleh manajer dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif (Rahmadi & Wahyudi, 2021).

H3: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

4. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham serta dalam pengawasan manajemen, karena hal ini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Semakin besar kepemilikan institusional, semakin berkurang perilaku oportunistik manajer, yang dapat menurunkan biaya keagenan dan diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan (Rahmadi and Wahyudi 2021).

Menurut teori keagenan, perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terpisah lebih rentan terhadap konflik. Untuk mengurangi perilaku menyimpang, diperlukan pengawasan dari pihak luar perusahaan. Kepemilikan saham oleh institusi dapat membantu mengurangi perilaku menyimpang manajer melalui mekanisme pengawasan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi mendorong pengawasan yang lebih intensif oleh investor institusional, yang dapat mencegah

perilaku oportunistik manajer. Pemegang saham institusional yang besar memiliki insentif untuk memantau keputusan perusahaan. Hal ini memberikan dampak positif bagi perusahaan karena semua keputusan akan lebih selaras dengan kepentingan perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan (Rahmadi and Wahyudi 2021).

H4: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

